

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi BAPPEDA

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretaris daerah. *sumber: <https://bappeda.jabarprov.go.id>, diunduh pada tanggal 18 Desember 2018.*

BAPPEDA Jawa Barat adalah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat. (*sumber: <https://bappeda.jabarprov.go.id>*), diunduh pada tanggal 18 Desember 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 disusun organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat meliputi:

- a) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- b) Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata.
- c) Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan fisik, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana

perumahan dan permukiman serta sumber daya alam, tata ruang dan lingkungan hidup.

- d) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya, meliputi pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- e) Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi perencanaan program pembangunan daerah, penganggaran pembangunan daerah, dan pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f) Balai Pengembangan Pengembangan Pembangunan dan Analisa yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan analisa potensi daerah dan pengembangan pembangunan sebagai bahan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang.
- g) Balai Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan, mempunyai tugas pokok pelayanan evaluasi perencanaan pembangunan. (sumber: <https://bappeda.jabarprov.go.id>), diunduh pada tanggal 18 Desember 2018.

2.1.2. Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara

Seperti pada **Tabel 2.1.** dijelaskan mengenai persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 4 m	minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri)		
	3. Ketinggian Lengit-lengit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, langgam/gaya, kearifan lokal)			
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu) . baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (<i>Glassfibre Reinforced Cement/ GRC</i>), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m2 luas bangunan gedung atau sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat.			Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
	- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- drainase	tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

Pada **Tabel 2.** Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018 dan sebagai berikut.

Tabel 2.2. Tabel Persyaratan Bahan Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
B	PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN				
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC, <i>homogeneous tile</i> (HT)	marmar lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit	marmar lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit, <i>floor hardener</i> .	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis Setempat.
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan, beton bertulang	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis, papan gipsium, papan GRC	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsium, papan GRC	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsium, papan GRC	
	4. Bahan Penutup Plafon	kayu-lapis dicat, gipsium	gipsium, kayu-lapis dicat, papan GRC	gipsium, kayu-lapis dicat, papan GRC	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, seng, sirap, metal, aluminium	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	
	6. Bahan Kosen	kayu/bambu laminating dicat/aluminium	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium anodized/coating, beton	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium anodized/coating, beton	
	7. Bahan Daun Pintu/Jendela	Kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, engineering wood, bambu laminating, metal, aluminium, PVC	

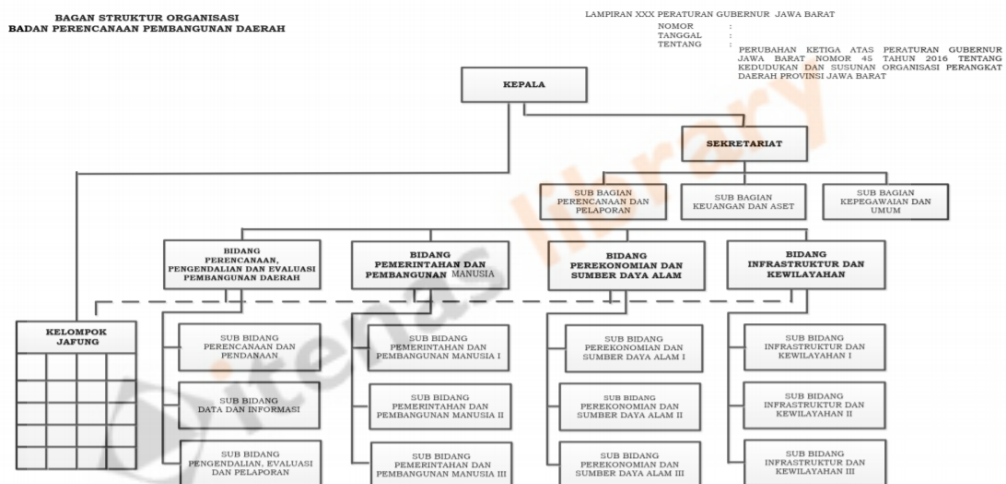
Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018

Pada **Tabel 2.3.** dijelaskan mengenai persyaratan bahan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tabel Persyaratan Struktur Bangunan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
C	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN				Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa.
1. Pondasi	batu kali, kayu, rollag bata, beton-bertulang K-200	batu kali, kayu, beton-bertulang K-250 atau lebih	batu kali, kayu, beton-bertulang K-300 atau lebih		
2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II		
3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II		
4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II		
5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja ringan, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat		
6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°		

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No.22 Tahun 2018



Bagan 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Jawa Barat

Sumber: BAPPEDA Jawa Barat, 2019

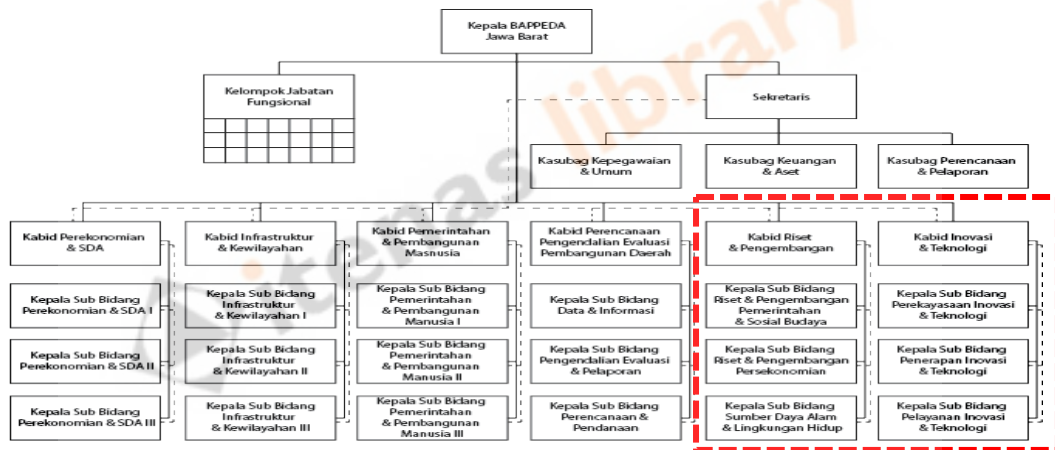
Berdasarkan Susunan Anggota BAPPEDA Jawa Barat yang terdapat pada **Bagan**

2.1. adalah sebagai berikut :

- Pimpinan 5 Orang
- Infrastruktur dan Wilayah 20 orang
- Pemerintahan dan Pembangunan 25 Orang
- Perekonomian 20 Orang
- Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 22 Orang
- Perencanaan dan Pelaporan 5 Orang

- g) Keuangan 17 Orang
- h) Kepegawaian Umum 22 Orang
- i) IPDN 2 Orang
- j) TKK 8 Orang

Sehingga total anggota BAPPEDA Jawa Barat adalah 146 Orang. Terdapat penambahan dua bidang baru seperti pada **Bagan 2.2.**, yaitu Bidang Riset dan Pengembangan dan Bidang Inovasi dan Teknologi. Sehingga terjadi penambahan personel baru pada BAPPEDA Jawa Barat. Dengan adanya penambahan personel baru, maka dibutuhkan penambahan ruang kerja untuk menampung para personel baru. Diperkirakan penambahan jumlah personel baru sebanyak 20 orang per bidang, sehingga diperlukan ruang tambahan untuk menampung personel sebanyak 40 orang.



Bagan 2.2. Struktur Organisasi Baru BAPPEDA Jawa Barat

Sumber: BAPPEDA Jawa Barat, 2019

2.2. Studi Banding dan Studi Banding Pustaka

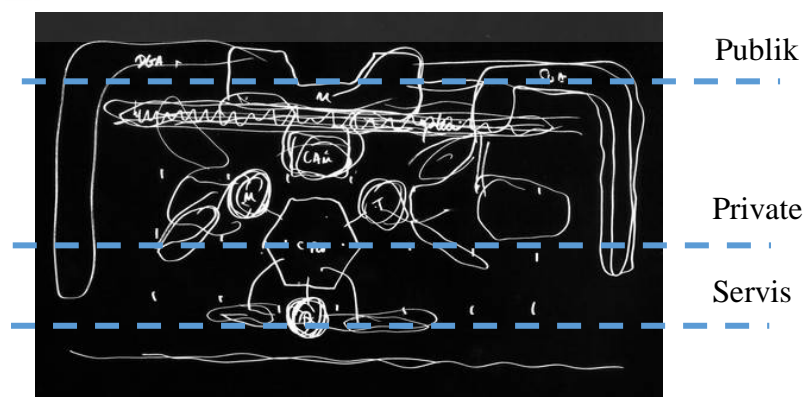
2.2.1 *New Ministry of Defense in Paris, Paris*



Gambar 2.1. *New Ministry of Defense in Paris*

Sumber <https://www.archdaily.com/363164/newministryofdefenseinparis-2> diunduh 18 Desember 2019

Pada **Gambar 2.1.** Gedung Departemen Pertahanan yang baru adalah operasi yang kompleks karena sifat urban dan arsitekturnya yang ganda. Terletak di lokasi seluas 16,5 hektar yang terbagi menjadi tiga plot: plot Victor di sebelah timur (8,5 hektar) adalah rumah bagi Cité de l'Air, yang bangunannya telah dihancurkan atau direhabilitasi; plot Valin pusat (8 hektar) ditempati oleh bangunan utama kementerian, dan plot Corne Ouest barat diberikan kepada program real estat komersial seperti pada **Gambar 2.2.**



Gambar 2.2. *New Ministry of Defense in Paris*

Sumber <https://www.archdaily.com/363164/newministryofdefenseinparis-on-pickering-woha-2> diunduh 18 Desember 2019

Penerapan massa bangunan yang di sesuaikan dengan fungsi zonasi kantor BAPPEDA. Menciptakan ruang ruang terbuka (*Innecourt*) sebagai pencahayaan dan penghawaan alami dalam kantor.

2.2.2 Katamama Hotel, Bali Indonesia



Gambar 2.3. Katamama Hotel

Sumber : <https://www.archdaily.com/899081/Katamama-Hotel-search> diunduh 18 Desember 2019

Katamama Hotel yang terdapat pada **Gambar 2.3**. Elemen desain kontemporer mengacu pada gaya hidup Bali dan taman hijau subur yang mencerminkan keindahan alam pulau itu. Eksterior Katamama mengambil isyarat dari praktik bangunan Bali tri angka, sebuah konsep di mana struktur ruang mencerminkan harmoni antara bangunan dan penghuninya.

Contoh material lokal yang dapat digunakan pada desain bangunan BAPPEDA, seperti pada **Gambar 2.4**.



Gambar 2.4. Kayu Ulin dan Batu Bata

Sumber : <https://www.google.com-material-lokal> diunduh 17 Desember 2019

Pengaplikasian material lokal dapat diimplementasikan pada rencana desain gedung BAPPEDA yaitu menggunakan material asal Jawa Barat atau material yang digunakan pada rumah adat Jawa Barat, seperti pada **Gambar 2.5**.



Gambar 2.5. Katamama Hotel

Sumber : <https://www.archdaily.com/899081/katamamahotel> diunduh 17 Desember 2019

Penggunaan material asal Jawa Barat dapat diaplikasikan juga pada interior ruangan kantor, seperti pada **Gambar 2.6**.



Gambar 2.6. Katamama Hotel

Sumber : <https://www.archdaily.com/899081/katamamahotel> diunduh 17 Desember 2019

2.2.3 Museum Paula Rego, Portugal



Gambar 2.7. Museum Paula Rego

Sumber : <https://www.tripzilla.id/Museum-paula-rego-12364> diunduh 17 Desember 2019

Gedung Departemen Pertahanan yang baru adalah operasi yang kompleks karena sifat urban dan arsitekturnya yang ganda. Terletak di lokasi seluas 16,5 hektar yang terbagi menjadi tiga plot (plot Victor di sebelah timur (8,5 hektar) adalah rumah bagi Cité de l'Air, yang bangunannya telah dihancurkan atau direhabilitasi) plot Valin pusat (8 hektar) ditempati oleh bangunan utama kementerian, dan plot Corne Ouest barat diberikan kepada program perumahan komersial, dapat dilihat pada **Gambar 2.7.**

Massa bentuk bangunan lokal yang diaplikasikan dengan konsep yang masuk pada era zaman sekarang, dengan penggabungan massa bentuk lokal dengan beberapa elemen massa yang lebih modern yang disesuaikan dengan fungsi bangunan

Pengaplikasian material dan massa bangunan menjadi salah satu pilihan untuk di adaptasi ke dalam rencana desain gedung BAPPEDA, seperti pada **Gambar 2.8.**



Gambar 2.8. Museum Paula Rego

Sumber : <https://www.tripzilla.id/Museum-paula-rego-12364> diunduh 17 Desember 2019

Massa bentuk bangunan lokal yang dapat dijadikan sebagai penghawaan atau pencahayaan alami pada bangunan, seperti pada **Gambar 2.9.**



Gambar 2.9. Potongan Museum Paula Rego

Sumber : <https://www.tripzilla.id/Museum-paula-rego-12364> diunduh 17 Desember 2019